



**PEMERINTAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

RENCANA KERJA (RENJA)

**KECAMATAN
MUARA BADAQ
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Periode Tahun 2023 merupakan kewajiban bagi setiap lembaga pemerintah seperti Badan, Dinas, Kantor serta Instansi Pemerintah yang lain. RENJA SKPD disamping berfungsi sebagai pedoman kerja dan dokumen, juga di harapkan menyatukan visi, misi, persepsi, strategi seluruh aparat Kecamatan Muara Badak dalam membina, melayani, dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang mandiri, serta untuk dapat mengevaluasi kinerja SKPD ditahun- tahun sebelumnya dan diharapkan untuk bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumberdaya manusia pada SKPD.

Dengan adanya Dokumen ini diharapkan setiap prioritas program yang telah ditetapkan berserta targetnya dapat dijadikan acuan utama bagi pelaksanaan kinerja yang ada pada Perangkat Daerah Kecamatan Muara Badak, yang akhirnya mampu mewujudkan VISI dan MISI Kecamatan Muara Badak.

Disadari sepenuhnya bahwasannya penyajian Usulan Rencana Kerja Awal (Ranwal) tahun Anggaran 2023 ini masih belum sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan masukan/saran-saran dari semua pihak agar dapat segera dilakukan penyempurnaan Ranwal pada tahun berikutnya.

Besar harapan, semoga Rencana Kerja Awal (Ranwal) ini dapat mendatangkan manfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Usulan Rencana Kerja ini.

Muara Badak, 1 Juli 2022

Camat Muara Badak,



ARPAN,S.Sos

Pembina

Nip. 196806121988031007

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
Latar Belakang.....	1
Landasan Hukum.....	2
Maksud dan Tujuan.....	3
Sistematika Penulisan.....	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA.....	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.....	16
2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.....	18
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	21
BAB III TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	53
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD.....	54
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
4.1. Program dan Kegiatan.....	55
BAB V PENUTUP.....	68

DAFTAR TABEL

Halaman

2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD SD Tahun 2022	7
2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Muara Badak	17
2.3	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023	22
4.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024	59

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah, Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa setiap daerah wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, yang salah satunya berupa dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk periode satu tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Muara Badak dipakai sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Muara Badak yang selanjutnya akan dipakai sebagai acuan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Muara Badak. Muatan Rencana Kerja Anggaran (RKA) meliputi input (dana, tenaga kerja, fasilitas, dll), kegiatan (proses) dan *output/outcome*. Sehingga perencanaan dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumberdaya dan arah pembangunan daerah. *Critical pointnya* adalah menyusun hubungan optimal antara input, proses, dan *output/outcome*.

Rencana Kerja Kecamatan Muara Badak Tahun 2023 disusun dengan menggunakan pendekatan perencanaan teknokratis (strategis berbasis kinerja), dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah yang merupakan suatu proses pemikiran strategis yang tercermin dari a) Evaluasi menyeluruh tentang kinerja pembangunan tahun lalu, b) Rumusan status kedudukan kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah masa kini, c) Rumusan peluang dan tantangan kedepan yang mempengaruhi penyusunan Renja, d) Rumusan tujuan, strategi dan kebijakan pembangunan, e) pertimbangan atas kendala ketersediaan sumberdaya dan dana, f) rumusan dan prioritas program dan kegiatan berbasis kinerja, g) Tolok ukur dan target kinerja capaian program dan kegiatan, h) prakiraan maju pendanaan untuk tahun berikutnya, i) kejelasan siapa yang bertanggungjawab untuk mencapai tujuan, sasaran dan hasil, serta waktu penyelesaian, termasuk review kemajuan pencapaian sasaran. Melalui pendekatan ini rencana yang disusun mencerminkan kerangka berfikir yang komprehensif dan terpadu, serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

Pendekatan demokratis dan partisipatif diwujudkan melalui a) Transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan, b) kesetaraan antara para pemangku kepentingan dari unsur Pemerintah dan non pemerintah, c) keterwakilan yang mewadai dari seluruh segmen masyarakat terutama kaum perempuan dan kelompok marjinal, d) berperan aktif pada pelaksanaan musrenbang RKPD dari segi penerapan perencanaan partisipatif, e) Konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan seperti perumusan isu dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi dan kebijakan serta prioritas program.

Pendekatan politis, penyusunan Renja Kecamatan Muara Badak mengacu pada RKPD dan RPJMD yang merupakan bentuk konsekuensi politis antara Bupati/Wakil Bupati terpilih. Pendekatan ini juga tercermin pada keterlibatan aktif DPRD dalam musrenbang Kecamatan dan kabupaten termasuk hasil sinergitas hasil jaring aspirasi masyarakat oleh DPRD, kemudian dokumen RKPD sebagai Peraturan Bupati mengikat semua pihak untuk menjadikan dokumen ini sebagai acuan dalam penyusunan seluruh dokumen perencanaan sampai RAPBD.

Pendekatan top down, perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan yang kemudian diselaraskan melalui rapat koordinasi dan musrenbang mulai tingkat nasional, provinsi dan kabupaten juga tujuan *globalMDGs*. Pendekatan ini tercermin pada a) sinergi dengan program prioritas nasional dan daerah, b) konsisten pada RPJMD, RKPD dan Renstra Kecamatan Muara Badak, Konsisten dengan dokumen RTRW daerah, c) penanganan masalah dengan pendekatan holistic dan pendekatan sistem.

Pendekatan *bottom-up*, perencanaan dilaksanakan secara berjenjang dan diselaraskan melalui musrenbang, konsisten terhadap visi misi RPJMD serta kesepakatan masyarakat tentang prioritas pembangunan dan hasil forum SKPD.

Penyusunan Renja ini disesuaikan dengan Permendagri 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan PP Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Renja ini memuat kerangka pendanaan yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Kecamatan maupun dengan mendorong partisipasi masyarakat.

1.2. Landasan hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
- g. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan & Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Penyusunan Renja ini dimaksudkan untuk:

1. Memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Muara Badak ;
2. Sebagai pemandu bagi pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Muara Badak

1.3.2 Tujuan

1. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Muara Badak Tahun 2022 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023;
2. Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan;
3. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

Penyusunan Renja ini bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Kecamatan Muara badak dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Kecamatan Muara Badak Tahun 2023 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penyusunan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4 Review Terhadap Rencana Awal RKPD dan Renstra Perangkat Daerah
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

- 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KECAMATAN MUARA BADAK TAHUN LALU

Penyusunan dan Pelaksanaan Renja mengacu pada tugas dan fungsi Kecamatan serta kewenangan pelayanan yang diberikan oleh Bupati kepada Kecamatan. Tugas pokok dan fungsi Kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, Adapun *tugas pokok dan fungsi dari Kantor Kecamatan Muara Badak* adalah:

A. Tugas Pokok

Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

B. Fungsi Utama

1. Pelaksanaan pengelolaan dan pengumpulan data berbentuk data base serta analisa data untuk menyusun program kegiatan;
2. Perencanaan strategis di bidang perencanaan kegiatan Kecamatan;
3. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati;
4. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
5. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
6. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang- undangan;
7. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
8. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
9. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
10. Pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya;
11. Penyelenggaraan kesekretariatan Kecamatan, pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan - kegiatan lain di lingkungan Kecamatan;

12. Fasilitasi dan Pembinaan terhadap Desa/Kelurahan serta Lembaga Kemasyarakatan.

C. Indikator Kinerja Utama

1. Tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam dengan tujuan untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbangcam dengan formula:

$$\frac{\text{Prosentase jumlah peserta musrenbang} \times 100}{\text{Jumlah usulan dalam musrenbang}}$$

2. Kelancaran Proses Pelayanan Administrasi Kecamatan, yang bertujuan untuk mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat, dengan formula:

$$\frac{\text{Prosentase Jumlah Layanan} \times 100}{\text{Jumlah Layanan Tepat Waktu}}$$

3. Keaktifan Siskamling yang bertujuan Untuk mengukur tingkat keamanan masyarakat dengan formula

$$\frac{\text{Prosentase Jumlah Kelompok Siskamling Aktif} \times 100}{\text{Jumlah keseluruhan pos siskamling}}$$

4. Tingkat Capaian Pembangunan Untuk mengukur capaian keberhasilan pembangunan yang menjadi kewenangan Kecamatan dengan formula

$$\frac{\text{Prosentase volume infrastruktur yang dibangun} \times 100}{\text{Jumlah keseluruhan target pembangunan}}$$

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun lalu dan capaian Renstra

Evaluasi Anggaran Kecamatan Muara Badak tahun lalu (2022) secara rinci dapat dilihat ada **Tabel 2.1 / Tabel T-C.29** dibawah ini:

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Kabupaten Kutai Kartanegara

Nama OPD : Kecamatan Muara Badak

Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2022)	
						Target Renja-PD tahun (2021)	Realisasi Renja-PD tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat aksesibilitas wilayah Kecamatan	Persen	100	100	22,6	22,6	100	100	100	100
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	Nilai	80	0	0	0	0	0	0	0
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	"Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan"	Nilai	80	0	0	0	0	0	0	0
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	Kegiatan	362	82	82	82	100	80	244	78,7
7 01 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Dokumen	52	0	0	0	0	0	0	0
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah kegiatan yang telah dilaksanakan terkait urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan	Kegiatan	310	82	82	82	100	80	244	78,7

7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan Yang Aktif	Persen	80	80	80	80	100	80	80	100
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	kegiatan	359	60	60	60	100	65	185	51,5
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	orang	1500	300	200	200	100	300	700	46.6
7	01	03	2.01	02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen	5	1	1	1	100	1	3	60
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan	5	1	1	1	100	1	3	60
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase kegiatan koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	Persen	100	0	0	0	0	100	0	0
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Nilai	80	0	0	0	0	64	0	0
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	persentase kegiatan koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	Persen	100	0	0	0	0	100	0	0

7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persen	80	0	0	0	0	100	0	0
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	Kegiatan	500	0	0	0	0	100	0	0
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kegiatan	500	0	0	0	0	100	0	0
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	Persen	80	0	0	0	0	100	0	0
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	80	0	0	0	0	100	0	0
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	"Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa"	Dokumen	5	0	0	0	0	1	0	0
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	"Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa"	Dokumen	25	0	0	0	0	5	0	0
X	XX	01.			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	80					70		
X	XX	01.	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai	80	80	80	60	75	70	40	50
X	XX	01.	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	Dokumen	10	2	2	2	100	2	6	60
X	XX	01.	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	Dokumen	5	0	0	0	0	1	1	20

						RKA-SKPD										
X	XX	01.	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	5	0	0	0	0	1	1	20	
X	XX	01.	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	5	1	1	1	100	1	1	20	
X	XX	01.	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	5	0	0	0	0	1	1	20	
X	XX	01.	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	1	1	1	100	1	3	60	
X	XX	01.	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	15	1	1	1	100	1	3	20	
X	XX	01.	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	140	26	26	26	100	30	82	58,5	
X	XX	01.	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen	10	2	2	2	100	2	6	60	
X	XX	01.	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lapora Koordinasi Penyusunan Lapo Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste SKPD	Laporan	5	1	1	1	100	1	3	60	
X	XX	01.	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	Laporan	80								
X	XX	01.	2.03	01	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	"Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD"	Laporan	5	1	1	1	100	1	3	60	
X	XX	01.	2.03	02	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	5	1	1	1	100	1	3	60	

X	XX	01.	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yg mendapatkan Pendidikan & pelatihan Berdasarkan tugas dan fungsi	Nilai	80	0	0	0	0	35	0	35
X	XX	01.	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	"Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian"	Dokumen	1	0	0	0	0	1	1	100
X	XX	01.	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	45	0	0	0	0	9	9	20
X	XX	01.	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi umum perangkat daerah	Persen	80					65		
X	XX	01.	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen nstalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jenis	30	6	6	6	100	6	18	60
X	XX	01.	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jenis	150	30	30	30	100	30	90	60
X	XX	01.	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jenis	15	3	3	3	100	3	9	60
X	XX	01.	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Lembar	10000	2000	2000	2000	100	2000	6000	60
X	XX	01.	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Orang	50	0	0	0	0	10	10	20
X	XX	01.	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Rapat	755	155	155	155	100	155	465	61
X	XX	01.	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Berkas	5000	1000	1000	1000	1000	1000	3000	60
X	XX	01.	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	80							
X	XX	01.	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	"Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat"	Laporan	5	1	1	1	100	1	3	60
X	XX	01.	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Rekening	480	96	96	96	100	96	288	60

X	XX	01.	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	"Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan"	Jenis	10	2	2	2	100	2	6	60
X	XX	01.	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	"Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan"	Orang	65	13	13	13	100	13	39	60
X	XX	01.	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	80	100	100	100	100	100	100	100
X	XX	01.	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	20	4	4	4	100	4	12	60
X	XX	01.	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	"Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara"	Unit	2	0	0	0	0	2	2	100
X	XX	01.	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	"Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi"	Unit	5	1	1	1	100	1	1	20
X	XX	01.	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	"Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi"	Unit	100	0	0	0	0	25	25	25

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat, terdapat 2 (dua) urusan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat meliputi Bidang Perizinan dan Non Perizinan. Pelimpahan sebagian urusan yang menjadi wewenang Bupati yang dilimpahkan kepada Camat tersebut dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tercipta pelayanan masyarakat yang professional, transparan, efektif dan efisien

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa jenis pelayanan utama yang ada di Kecamatan Muara Badak, namun secara umum, pelayanan di Kecamatan Muara Badak dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Pelayanan teknis administrasi baik kedalam maupun keluar.
2. Pelayanan legalisasi surat-surat dan rekomendasi kepada masyarakat.
3. Pelayanan yang bersifat penyediaan data atau informasi kepada Dinas Instansi yang berada di Wilayah Kecamatan maupun Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Pelayanan kepada Pemerintahan Kelurahan dan Masyarakat terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan.

Selanjutnya, terkait dengan pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Muara Badak selama kurun waktu tahun 2021 – 2026, yakni ada 4 Indikator Kinerja Utama

1. Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti;
2. Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
3. Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa; dan
4. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan.

Lebih detail tentang pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Muara Badak, dapat dilihat pada **tabel 2.2 / Tabel T-C.30** dibawah ini :

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Muara Badak
Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra - PD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti			100	100	100	100	100	100	0	100	100	Realisasi capaian tahun 2022 belum ada karena masih berjalan
2	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum			71	74	78	80	80	0	0	74	78	
3	Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa			95	97	99	100	100	0	0	97	99	
4	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan			60	62	64	65	65	0	0	62	64	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD

1. Permasalahan

Permasalahan Kecamatan Muara Badak dalam melaksanakan tupoksinya adalah masih lemahnya/belum optimalnya pola Koordinasi fasilitasi, Motivasi lintas sektor di setiap Tupoksi Pemerintahan, Ekonomi Pembangunan, Kesejahteraan Masyarakat, Aset Pertanahan dan keamanan wilayah yang disebabkan :

- a. Kualitas SDM yang belum memadai;
- b. Etos kerja yang belum terbina secara optimal;
- c. Terbatasnya Anggaran Pembangunan Skala Kecil Kecamatan;
- d. Belum optimalnya peran Masyarakat dalam pembangunan.

Sedangkan permasalahan khusus yang muncul dalam pelaksanaan tupoksi Kecamatan Muara badak secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Bidang Pemerintahan:

- 1) Urusan Kependudukan memiliki permasalahan :
 - Bahwa masih banyak warga yang belum melakukan Perekaman KTP-eL;
 - Masih banyak warga yang mutasi atau pindah tidak melapor sehingga kevalidan data penduduk sulit di capai.Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka mengatasi masalah tersebut di atas antara lain melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil disetiap kesempatan selalu melaksanakan sosialisasi ke Kecamatan, hal ini tentunya sangat berdampak positif bagi masyarakat, dengan harapan 100%. Warga sudah mempunyai KK serta secara keseluruhan dapat mengikuti proses perekaman KTP-Elektronik, dan masih banyak KTP Elektronik yang belum jadi sehingga menimbulkan keresahan warga
- 2) Pembinaan Perangkat memiliki Permasalahan:
 - Masih perlu peningkatan sumber daya manusia Aparatur Kelurahan serta sarana komputer yang memadai agar setiap program pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat dapat efektif dan efisien;
 - Sistem administrasi Produk Hukum, Kependudukan dan urusan Pemerintahan kurang tertata.

Upaya yang telah dilakukan:

1. Perlu pelatihan peningkatan kapasitas SDM aparatur di Kecamatan;
2. Pengalokasian anggaran untuk belanja kebutuhan sarana dan prasarana administrasi;
3. Perlu pembinaan secara berkesinambungan tentang Produk hukum narasumber dari Pemerintah Kabupaten dan praktisi hukum.

B. Bidang Pertanahan Dan Aset, Permasalahan:

- a. Masih Banyak Kasus-kasus tumpang tindih kepemilikan tanah sehingga menimbulkan konflik.
- b. Adanya SKPT ganda
- c. Masyarakat yang memiliki SKPT tidak berada di wilayah setempat (luar kota) sehingga menyulitkan penyelesaian konflik kepemilikan tanah.

Upaya yang telah dilakukan

Dilakukan inventarisasi penyelesaian kasus tanah secara berjenjang dan bertahap, dan melakukan pengukuran menggunakan GPS untuk mengurangi kesalahan ukuran dan batas- batas kepemilikan tanah.

Melakukan sosialisasi terhadap pemilik tanah yang bukti kepemilikannya hanya SKPT untuk melakukan pendaftaran ulang SKPT/pemutakhiran SKPT dari ukuran manual diganti dengan GPS.

C. Bidang Ekonomi Pembangunan & Pemberdayaan Perempuan,

Permasalahan :

- a. Masih banyaknya pengajuan proposal baik dibidang pembangunan maupun di bidang perekonomian yang masih belum direalisasi;
- b. Minimnya sosialisasi dari Stake Holder yang membidangi baik dari pemerintah maupun dari lembaga lain;
- c. Lemahnya koordinasi antara masyarakat dengan pihak pemerintah.

Upaya yang telah dilakukan:

Berupaya untuk memfasilitasi terlaksananya sosialisasi, koordinasi antara masyarakat dan lembaga - lembaga yang berada di tingkat Desa atau Kelurahan maupun kecamatan dengan stake holder atau dinas terkait dan pihak swasta yang ada diwilayah Kecamatan Muara Badak.

D. Bidang Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan :

- a. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan bagi warga dan lingkungan;
- b. Banyaknya pernikahan usia muda (20 tahun kebawah);
- c. Sosialisasi KPR (kesehatan reproduksi keluarga masih dirasa kurang);
- d. Kurang adanya koordinasi dan keterbukaan dengan para instansi maupun lembaga yang membidangi dengan para generasi muda yang terhimpun dalam
- e. karang taruna di masing-masing wilayah.

Upaya yang telah dilakukan :

- a. Meningkatkan peran Institusi masyarakat dan meningkatkan penyuluhan oleh kesehatan dan dinas Sektoral tentang pentingnya menjaga kesehatan serta memanfaatkan momentum kegiatan-kegiatan dalam penyuluhan secara langsung, berkala dan terpadu utamanya kegiatan Posyandu serta memanfaatkan momentum dalam memecahkan masalah;
- b. Meningkatkan koordinasi lintas sektoral dalam peningkatan kesempatan kerja sama dengan Desa untuk memaksimalkan peran kader dan institusi masyarakat dalam peningkatan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya memaksimalkan pencapaian target KB;
- c. Adanya pengajuan program pembangunan melalui proposal yang beragam dan cukup banyak untuk mendapatkan tanda tangan persetujuan Camat, baik yang berupa pengajuan proposal pembangunan fisik maupun non fisik yang bersifat untuk kepentingan masyarakat;
- d. Telah dicukupinya kelengkapan administrasi dan inventarisasi proyek;
- e. Telah dilakukan koordinasi dengan instansi/lembaga serta karang taruna yang ada di wilayah guna menumbuh kembangkan bakat dan kemampuan para generasi muda.

E. Bidang Trantibum, Sektor Keamanan Lingkungan Masyarakat, *Permasalahan:*

- a. Minimnya kesadaran masyarakat bahwa keamanan lingkungan adalah tanggungjawabbersama;
- b. Belum ada kepedulian masyarakat terhadap antisipasi bencana di masing-masing lingkungan;
- c. Minimnya kesadaran hukum (hak dan Kewajiban) yang harus dipenuhi masyarakat danpelaku usaha.

Rekomendasi :

1. Mengadakan rapat pembinaan Linmas dan Koordinasi satgas yang lain;
2. Pembentukan unit Operasional Penanggulangan bencana Pembentukan satuan Linmastanggap bencana;
3. Mengadakan Sosialisasi secara berkala;
4. Meningkatkan kesadaran hukum (hak dan Kewajiban) yang harus dipenuhi masyarakatdan pelaku usaha.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah TahunAnggaran 2022

Review rancangan awal RKPD Kecamatan Muara Badak adalah perbandingan antara program/kegiatan yang tertuang ke dalam rancangan awal dengan hasil analisis kebutuhan SKPD atau adanya perubahan program kegiatan yang tidak sesuai dengan tupoksi SKPD.

Review secara rinci dapat disampaikan sebagaimana dalam **Tabel 2.3** dibawah ini :

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kabupaten Kutai Kartanegara

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Muara Badak

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kec.Muara Badak	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	B (70)	6,063,391,057	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kec.Muara Badak	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	B (70)	5,896,691,057	
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec.Muara Badak	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	134,790,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec.Muara Badak	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	124,790,000	
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec.Muara Badak	Jumlah dokumen	Dokumen	2	40,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec.Muara Badak	Jumlah dokumen	Dokumen	2	40,000,000	
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec.Muara Badak	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	10,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec.Muara Badak	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	10.000.000	

1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec.Muara Badak	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	10,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec.Muara Badak	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	15,000,000
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kec.Muara Badak	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	9,520,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kec.Muara Badak	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	9,520,000
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kec.Muara Badak	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	10,270,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kec.Muara Badak	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	10,270,000
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec.Muara Badak	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	55,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec.Muara Badak	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	40,000,000
1.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec.Muara Badak	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	Nilai	67	3,980,878,304	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec.Muara Badak	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	Nilai	67	3,960,878,304
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec.Muara Badak	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	28	3,810,653,404	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec.Muara Badak	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	28	3,810,653,404
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec.Muara Badak	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan	1	45,184,900	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec.Muara Badak	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan	1	25,184,900

			Tahun SKPD						SKPD				
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kec.Muara Badak	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lapora Koordinasi Penyusunan Lapo Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	1	125,040,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kec.Muara Badak	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lapora Koordinasi Penyusunan Lapo Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	1	125,040,000	
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kec.Muara Badak	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	Nilai	68	65,800,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kec.Muara Badak	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	Nilai	68	65,800,000	
1.3.1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kec.Muara Badak	"Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD"	Dokumen	1	25,000,000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kec.Muara Badak	"Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD"	Dokumen	1	25,000,000	
1.3.2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec.Muara Badak	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	40,800,000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec.Muara Badak	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	40,800,000	
1.4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec.Muara Badak	Jumlah Pegawai yg mendapatkan Pendidikan & pelatihan Berdasarkan tugas dan fungsi	Nilai	68	105,792,792	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec.Muara Badak	Jumlah Pegawai yg mendapatkan Pendidikan & pelatihan Berdasarkan tugas dan fungsi	Nilai	68	49,092,792	
1.4.1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kec.Muara Badak	"Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian"	Dokumen	1	56,700,000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kec.Muara Badak	"Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian"	Dokumen	1		0

1.4.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kec.Muara Badak	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	9	49,092,792	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kec.Muara Badak	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	9	49,092,792
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec.Muara Badak	Persentase pemenuhan Administrasi umum perangkat daerah	Persen	68	514,587,349	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec.Muara Badak	Persentase pemenuhan Administrasi umum perangkat daerah	Persen	68	494,587,349
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec.Muara Badak	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jenis	6	5,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec.Muara Badak	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jenis	6	5,000,000
1.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec.Muara Badak	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jenis	30	55,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec.Muara Badak	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jenis	30	35,000,000
1.5.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec.Muara Badak	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jenis	3	99,707,349	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec.Muara Badak	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jenis	3	99,707,349
1.5.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec.Muara Badak	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Lembar	2000	10,000,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec.Muara Badak	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Lembar	2000	10,000,000
1.5.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec.Muara Badak	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	50,000,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec.Muara Badak	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	50,000,000
1.5.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec.Muara Badak	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Laporan	1	244,880,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec.Muara Badak	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Laporan	1	244,880,000

1.5.6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kec.Muara Badak	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Laporan	1	50,000,000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kec.Muara Badak	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Laporan	1	50,000,000
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec.Muara Badak	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen	67	671,430,352	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec.Muara Badak	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen	67	671,430,352
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec.Muara Badak	"Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat"	Laporan	1	3,300,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec.Muara Badak	"Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat"	Laporan	1	3,300,000
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec.Muara Badak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	385,707,209	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec.Muara Badak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	385,707,209
1.6.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec.Muara Badak	"Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan"	Laporan	1	12,568,400	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec.Muara Badak	"Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan"	Laporan	1	12,568,400
1.6.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec.Muara Badak	"Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan"	Laporan	1	269,854,743	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec.Muara Badak	"Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan"	Laporan	1	269,854,743
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec.Muara Badak	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	persen	69	590,112,260	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec.Muara Badak	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	persen	69	530,112,260
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Kec.Muara Badak	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	Unit	4	382,986,900	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Kec.Muara Badak	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	Unit	4	382,986,900

	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Perizinannya				Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Perizinannya				
1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec.Muara Badak	"Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara"	Unit	2	50,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec.Muara Badak	"Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara"	Unit	2	50,000,000	
1.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec.Muara Badak	"Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi"	Unit	1	97,125,360	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec.Muara Badak	"Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi"	Unit	1	97,125,360	
1.7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec.Muara Badak	"Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi"	Unit	25	60,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec.Muara Badak	"Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi"	Unit	25	0	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec.Muara Badak	Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	Persen	100	5,905,533,353	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec.Muara Badak	Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	Persen	100	5,855,533,353	
2.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kec.Muara Badak	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	Nilai	68	50,000,000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kec.Muara Badak	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	Nilai	68	35,533,353	
2.1.1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	Kec.Muara Badak	"Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	Laporan	1	50,000,000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	Kec.Muara Badak	"Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	Laporan	1	5,820,000,000	

	Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Wilayah Kecamatan"				Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Wilayah Kecamatan"				
2.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec.Muara Badak	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	Kegiatan	61	5,855,533,353	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec.Muara Badak	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	Kegiatan	61	5,855,533,353	
2.2.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec.Muara Badak	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Persen	100	35,533,353	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec.Muara Badak	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Persen	100	35,533,353	
2.2.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec.Muara Badak	Jumlah kegiatan yang telah dilaksanakan terkait urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan	kegiatan	61	5,820,000,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec.Muara Badak	Jumlah kegiatan yang telah dilaksanakan terkait urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan	kegiatan	61	5,820,000,000	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan Yang Aktif	Persen	77,5	481,439,900	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan Yang Aktif	Persen	77,5	481,439,900	
3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	Kegiatan	68	481,439,900	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	Kegiatan	68	481,439,900	
3.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec.Muara Badak	Jumlah masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Orang	300	75,794,000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec.Muara Badak	Jumlah masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Orang	300	75,794,000	
3.1.2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang	Kec.Muara Badak	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan	Dokumen	13	72,600,000	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang	Kec.Muara Badak	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan	Dokumen	13	72,600,000	

	Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				
3.1.3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec.Muara Badak	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	333,045,900	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec.Muara Badak	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	333,045,900	
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec.Muara Badak	persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	persen	100	44,000,000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec.Muara Badak	persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	persen	100	51,454,000	
4.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec.Muara Badak	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	persen	68	44,000,000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec.Muara Badak	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	persen	68	51,454,000	
4.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kec.Muara Badak	persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	Persen	100	44,000,000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kec.Muara Badak	persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	Persen	100	51,454,000	
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec.Muara Badak	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persen	65	50,000,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec.Muara Badak	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persen	65		0

5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec.Muara Badak	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	Kegiatan	5	50,000,000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec.Muara Badak	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	Kegiatan	5	0
5.1.1	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec.Muara Badak	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kegiatan	1	50,000,000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec.Muara Badak	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kegiatan	1	0
6.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec.Muara Badak	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	Persen	74	123,803,750	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec.Muara Badak	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	Persen	74	53,803,750
6.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec.Muara Badak	Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	68	123,803,750	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec.Muara Badak	Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	68	53,803,750
6.1.1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec.Muara Badak	"Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa"	Dokumen	1	22,811,250	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec.Muara Badak	"Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa"	Dokumen	1	22,811,250
6.1.2	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec.Muara Badak	"Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa"	Dokumen	6	30,992,500	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec.Muara Badak	"Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa"	Dokumen	6	30,992,500
6.1.3	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec.Muara Badak	"Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya"	Laporan	1	70,000,000	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec.Muara Badak	"Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya"	Laporan	1	0
			Jumlah			12,668,168,060			Jumlah			

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan masyarakat tentang program pembangunan terakomodir dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Desa/Kelurahan dan kecamatan setiap satu tahun sekali. Dari dokumen perencanaan yang ada, sebagian besar usulan masyarakat lebih difokuskan kepada pembangunan fisik. Hal ini dapat dimengerti karena memang masyarakat sangat mendambakan sarana pelayanan umum yang layak, misalnya jalan , jembatan , gedung sekolah dan tempat ibadah. Usulan program dan kegiatan wilayah Kecamatan Muara Badak yang utamanya mengedepankan bidang infrastruktur dan umumnya dalam bidang pendidikan.

Keberhasilan pembangunan tidaklah semata - mata ditentukan oleh banyaknya kegiatan yang dilakukan atau diprogramkan. Alasan yang paling lazim untuk pernyataan tersebut adalah keterbatasan dana dan sumberdaya pendukung lainnya. Oleh karena itu perlu dalam satu perencanaan memilah kegiatan mana yang mendesak dan segera dibutuhkan masyarakat dan kegiatan mana yang dapat ditunda. Dengan kata lain dalam setiap perencanaan pembangunan perlu menyusun prioritas program kegiatan.

Prioritas program pembangunan Kecamatan Kembang Muara Badak Tahun 2022 mengacu pada arah Kebijakan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang secara umum sebagaiberikut :

- a. Peningkatan kinerja Aparatur Pemerintahan Kecamatan dan Pemerintahan Desa/Kelurahan.
- b. Peningkatan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan/Mikro.
- c. Peningkatan Fungsi Kecamatan bidang pembangunan skala kecil sesuai permasalahanKecamatan.

Namun demikian kegiatan lain yang bersifat non fisik masih mendapat apresiasi dari masyarakat, misalnya pelatihan keterampilan, bantuan usaha kecil, walaupun volumenya kecil.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran, maka Dokumen Perencanaan disusun mulai dari dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RT RW), RPJPD, RPJMD dan Renstra, sedangkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah diaktualisasikan melalui Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah tahun 2023 yang akan diimplementasikan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023. Sesuai dengan kerangka pemikiran tersebut di atas, maka Rencana Kerja Kecamatan Muara Badak Tahun Anggaran 2023 hakekatnya merupakan Dokumen Perencanaan yang memberikan arah perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu. Dalam proses penyusunan Renja juga harus memperhatikan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun provinsi.

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan good governance dan akuntabilitas publik. Oleh sebab itu kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Muara Badak dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 adalah sebagai berikut

- a) Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

- b) Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

Telaah terhadap kebijakan Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dimana secara teknokratis prioritas Kabupaten Kutai Kartanegara telah mengacu pada prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Kalimantan Timur, dimana kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2) yang menyebutkan : *Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah.*

Jadi dapat dikatakan bahwa, semakin besar wewenang yang dilimpahkan semakin besar tanggung jawab camat dalam mengemban tugasnya.

3.2 Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD Kecamatan Muara Badak yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD Kecamatan Muara badak Tahun 2021-2026.

Dengan menitikberatkan pada Visi dan Misi yang telah diuraikan sebelumnya Kecamatan Muara Badak mempunyai tujuan yaitu *“Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan Yang Efektif, Efisien, Inovatif, Transparan dan Akuntabel”*, yang artinya Meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah dari segi kelembagaan, profesionalisme sumberdaya aparatur, dan keuangan daerah dalam rangka pelayanan publik yang prima dan kondusifitas daerah. Meningkatkan sarana infrastruktur sebagai akses masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, meningkatkan partisipasi masyarakat / perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan musrenbangcam, meningkatkan kelancaran proses administrasi kependudukan dan meningkatkan keamanan lingkungan.

Adapun sasaran yang ingin dicapai yaitu *“Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan”*, yang artinya meningkatnya tertib administrasi pemerintah dan kualitas pelayanan publik dan meningkatnya Interkoneksi antar wilayah.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Kecamatan Muara Badak merupakan salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (PD) sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu. Kecamatan Muara Badak sebagai Perangkat Daerah pelaksana teknis kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Camat mempunyai fungsi ; Menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan di Kecamatan dan pembinaan Kelurahan/Desa; Pembinaan ketentraman dan ketertiban; Pembinaan pemberdayaan masyarakat; Pembinaan kesejahteraan rakyat; dan Pembinaan pelayanan umum.

Penetapan Program dan kegiatan disamping menyesuaikan Visi dan Misi Kabupaten Kutai Kartanegara adalah bagaimana menyelesaikan masalah-masalah yang tingkat urgensinya tinggi terutama permasalahan Bidang Sarana dan Prasarana adalah penanggulangan banjir, sampah dan perbaikan sarana gang, serta jembatan sedangkan bidang sosial budaya adalah perbaikan RKB dan Peningkatan Sarana Posyandu melalui kegiatan PKK di wilayah Kecamatan Muara badak.

Adapun faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dan uraian garis besar rekapitulasi program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

a) Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan :

- Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Perumusan program dan kegiatan di Kecamatan Muara Badak diarahkan untuk mencapai visi dan misi Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026. Sehingga program dan kegiatan dalam Renja Kecamatan Muara Badak merupakan

implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Bupati.

- **Pencapaian MDGs**

Millinium Development Goals merupakan kesepakatan dari negara-negara didunia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia, khususnya masyarakat dunia ke tiga yang kondisi ekonominya masih dibawah standar, dililit kemiskinan dan masih mengalami gejolak politik sehingga sulit membangun dirinya. Kesepakatan antar negara ini dituangkan dalam berbagai target yang harus dicapai oleh negara-negara yang ikut menanda tangani MDGs, seperti pengentasan kemiskinan sampai 50%, meningkatkan derajat kesehatan, meningkatkan pendidikan masyarakat dan sebagainya. Indonesia sebagai sebuah negara yang ikut menanda tangani program ini juga dituntut untuk dapat memenuhi pencapaian target MDGs. Sebagai konsekuensinya maka pemerintah daerah diseluruh Indonesia juga berkewajiban untuk mencapai target-target MDGs ini. Program dan kegiatan yang dirancang dalam Renja Kecamatan Muara Badak diimplentasikan untuk mencapai target-target MDGs itu dalam lingkup Kecamatan.

- **Pemberantasan Kemiskinan**

Sejalan dengan upaya negara-negara berkembang untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin, maka Pemerintah Indonesia dengan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat serius dalam upayanya mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan banyak digambarkan sebagai suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global yang butuh perhatian serius.

Upaya penanggulangan kemiskinan mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Demikian pula halnya dengan penanggungan kemiskinan di Kecamatan Muara Badak. Program dan kegiatan yang dirancang pada tahun anggaran 2023 yang akan datang diarahkan pula untuk menciptakan kondisi dimana lebih mudahnya masyarakat miskin mendapatkan akses dibidang kesehatan, pendidikan dan lapangan pekerjaan sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Pemberantasan kemiskinan pun menjadi salah satu indikator pencapaian kinerja didalam perjanjian kinerja antara Camat kepada Bupati, dimana terdapat 2(dua) indikator yaitu yang pertama membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah. Yang kedua melakukan pengendalian terhadap verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta berkoordinasi dalam rangka penurunan angka kemiskinan di wilayah Kecamatan Muara Badak

- **Pencapaian SPM**

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pelayanan masyarakat tidak lepas dari norma, aturan, standar dan ukuran yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Salah satu kendala dalam pelayanan publik adalah variasi dalam proses pelayanannya. Untuk mengurangi variasi dalam pelayanan publik ini dibutuhkan adanya standarisasi pelayanan. Proses standarisasi pelayanan publik meliputi penyusunan, penerapan, monitoring, pengendalian, evaluasi dan revisi standar.

Sesuai dengan PP Nomor 65 tahun 2005 Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diterima oleh setiap warga secara minimal. Oleh karena itu setiap jenis pelayanan harus jelas tolak ukurnya sehingga dapat dijadikan alat kontrol terhadap adanya penyimpangan dari nilai yang ditetapkan. Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan janji dari dalam menyediakan pelayanan wajib kepada masyarakat yang dilayani.

Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal setiap unit kerja wajib menyusun Standar Operasional Prosedur maupun Instruksi Kerja sesuai kebutuhan. Penyusunan Program dan Kegiatan di Kecamatan Muara Badak diarahkan untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Program yang terkait dengan ini adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan, Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

- **Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah**

Kecamatan Muara Badak sebagai sebuah Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki berbagai potensi ekonomi yang memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara. Potensi itu terutama terkait dengan bidang perkebunan kelapa sawit, dimana di Kecamatan Muara Badak terdapat beberapa perusahaan perkebunan kelapa sawit swasta yang cukup besar dan juga kebun kelapa sawit rakyat yang ada diseluruh desa diwilayah Kecamatan Muara Badak, Pabrik CPO, Tambang Migas dan Batu Bara, Perikanan Laut dan Darat, Pertanian dan perkebunan dan ada juga sarang burung walet yang bisa dikatakan cukup banyak.

Semua potensi perekonomian yang dapat memberikan sumbangan pendapatan asli daerah maupun memberi peluang terhadap kesempatan kerja, diupayakan untuk lebih didayagunakan dan dikembangkan di Kecamatan Muara Badak melalui penyusunan berbagai Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja ini.

b) Uraian Garis Besar mengenai rekapitulasi Program dan Kegiatan.

- **Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan.**

Jumlah Program yang diusulkan untuk dilaksanakan di Kecamatan Muara Badak Tahun 2023 adalah 6 Program dengan 12 Kegiatan yang terdiri dari 39 sub kegiatan.

- **Sifat Penyebaran Lokasi Program dan Kegiatan.**

Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kecamatan Muara badak sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Muara Badak dan melingkupi semua Desa.

- **Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut Sumber Pendanaan.**

Adapun secara detail akan kami sajikan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023 pada tabel **4.1** dibawah ini :

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2023
dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Kabupaten Kutai Kartanegara

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Muara Badak

Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Rancangan Tahun 2023 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana		Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kec.Muara Badak	Nilai	B (70)	6,063,391,057	DBH		Nilai	B (70)	5,896,691,057
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec.Muara Badak	Nilai	B (70)	134,790,000	DBH		Nilai	B (70)	124,790,000
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	Kec.Muara Badak	Dokumen	2	40,000,000	DBH		Dokumen	2	40,000,000
7 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec.Muara Badak	Dokumen	1	10,000,000	DBH		Dokumen	1	10.000.000
7 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec.Muara Badak	Dokumen	1	10,000,000	DBH		Dokumen	1	15,000,000
7 01 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kec.Muara Badak	Dokumen	1	9,520,000	DBH		Dokumen	1	9,520,000

7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kec.Muara Badak	Dokumen	1	10,270,000	DBH		Dokumen	1	10,270,000
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec.Muara Badak	Laporan	1	55,000,000	DBH		Laporan	1	40,000,000

7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	Kec.Muara Badak	Nilai	67	3,980,878,304	DBH		Nilai	72	3,960,878,304
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec.Muara Badak	orang	28	3,810,653,404	DBH		orang	28	3,810,653,404
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec.Muara Badak	Laporan	1	45,184,900	DBH		Laporan	1	25,184,900
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lapora Koordinasi Penyusunan Lapo Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste SKPD	Kec.Muara Badak	Laporan	1	125,040,000	DBH		Laporan	1	125,040,000
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	Kec.Muara Badak	Nilai	68	65,800,000	DBH		Nilai	70	65,800,000
7	01	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	"Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD"	Kec.Muara Badak	Dokumen	1	25,000,000	DBH		Dokumen	1	25,000,000
7	01	01	2.03	02	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec.Muara Badak	Laporan	1	40,800,000	DBH		Laporan	1	40,800,000

7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yg mendapatkan Pendidikan & pelatihan Berdasarkan tugas dan fungsi	Kec.Muara Badak	Nilai	68	105,792,792	DBH		Nilai	70	49,092,792
7	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	"Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian"	Kec.Muara Badak	Dokumen	1	56,700,000	DBH		Dokumen	1	0
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kec.Muara Badak	orang	9	49,092,792	DBH		orang	9	49,092,792
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi umum perangkat daerah	Kec.Muara Badak	Persen	68	514,587,349	DBH		Persen	72	494,587,349
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen nstalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec.Muara Badak	Jenis	6	5,000,000	DBH		Jenis	6	5,000,000
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec.Muara Badak	Jenis	30	55,000,000	DBH		Jenis	30	35,000,000

7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec.Muara Badak	Jenis	3	99,707,349	DBH	Jenis	3	99,707,349
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec.Muara Badak	Lembar	2000	10,000,000	DBH	Lembar	2000	10,000,000
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec.Muara Badak	Laporan	1	50,000,000	DBH	Laporan	1	50,000,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Kec.Muara Badak	Laporan	1	244,880,000	DBH	Laporan	1	244,880,000
7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Kec.Muara Badak	Laporan	1	50,000,000	DBH	Laporan	1	50,000,000
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec.Muara Badak	persen	67	671,430,352	DBH	persen	70	671,430,352

7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	"Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat"	Kec.Muara Badak	Laporan	1	3,300,000	DBH	Laporan	1	3,300,000
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec.Muara Badak	Laporan	1	385,707,209	DBH	Laporan	1	385,707,209
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	"Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan"	Kec.Muara Badak	Laporan	1	12,568,400	DBH	Laporan	1	12,568,400
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	"Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan"	Kec.Muara Badak	Laporan	1	269,854,743	DBH	Laporan	1	269,854,743
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kec.Muara Badak	persen	69	590,112,260	DBH	persen	73	530,112,260
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kec.Muara Badak	Unit	4	382,986,900	DBH	Unit	4	382,986,900

7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	"Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara"	Kec.Muara Badak	Unit	2	50,000,000	DBH	Unit	2	50,000,000
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	"Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi"	Kec.Muara Badak	Unit	1	97,125,360	DBH	Unit	1	97,125,360
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	"Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi"	Kec.Muara Badak	Unit	25	60,000,000	DBH	Unit	25	0
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	Kec.Muara Badak	Persen	100	5,905,533,353	DBH	Persen	100	5,855,533,353
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	Kec.Muara Badak	Nilai	68	50,000,000	DBH	Nilai	70	0
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	"Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan"	Kec.Muara Badak	Laporan	1	50,000,000	DBH	Laporan	1	0
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	Kec.Muara Badak	Kegiatan	61	5,855,533,353	DBH	Kegiatan	61	5,855,533,353

7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Kec.Muara Badak	Persen	100	35,533,353	DBH		Persen	100	35,533,353
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah kegiatan yang telah dilaksanakan terkait urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan	Kec.Muara Badak	kegiatan	61	5,820,000,000	DBH		kegiatan	61	5,820,000,000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan Yang Aktif	Kec.Muara Badak	Persen	77,5	481,439,900	DBH		Persen	78	481,439,900
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	Kec.Muara Badak	Kegiatan	68	481,439,900	DBH		Kegiatan	72	481,439,900
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec.Muara Badak	Orang	300	75,794,000	DBH		Orang	50	75,794,000
7	01	03	2.01	02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kec.Muara Badak	Dokumen	13	72,600,000	DBH		Kegiatan	11	72,600,000
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec.Muara Badak	Laporan	5	333,045,900	DBH		Kegiatan	100	333,045,900
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase kegiatan koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	Kec.Muara Badak	persen	100	44,000,000	DBH		persen	100	51,454,000
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec.Muara Badak	persen	68	44,000,000	DBH		persen	72	51,454,000

7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	Kec.Muara Badak	Persen	100	44,000,000	DBH	Persen	100	51,454,000
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec.Muara Badak	Persen	65	50,000,000	DBH	Persen	72	0
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	Kec.Muara Badak	Kegiatan	5	50,000,000	DBH	Kegiatan	5	0
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kec.Muara Badak	Kegiatan	1	50,000,000	DBH	Kegiatan	1	0
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	Kec.Muara Badak	Persen	74	123,803,750	DBH	Persen	76	53,803,750
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Kec.Muara Badak	Persen	68	123,803,750	DBH	Persen	75	53,803,750
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	"Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa"	Kec.Muara Badak	Dokumen	1	22,811,250	DBH	Dokumen	1	22,811,250
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	"Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa"	Kec.Muara Badak	Dokumen	6	30,992,500	DBH	Dokumen	6	30,992,500
7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	"Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya"	Kec.Muara Badak	Laporan	1	70,000,000	DBH	Laporan	1	0
						Jumlah				12,668,168,060				

BAB V P E N U T U P

Rencana Kerja Kecamatan Muara Badak Tahun 2023 ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Muara Badak tahun 2021 – 2026 dan merupakan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Muara Badak Periode Tahun 2023.

Bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Muara Badak Tahun 2023 dimaksud untuk mengidentifikasi perkiraan sumberdaya dan dana pembangunan serta dengan Rencana Kerja Kecamatan Muara Badak Tahun 2023 ini juga diharapkan dapat mewujudkan sinergitas, efisiensi dan efektifitas perencanaan alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah.

Untuk itu mengetahui efektifitas dan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan ini, akan diadakan evaluasi dan dipertanggungjawabkan kepada Bupati Kutai Kartanegara. Demikian untuk dilaksanakan.

Muara Badak, 1 Juli 2022

Camat Muara Badak,



ARPAN,S.Sos
Pembina
Nip. 196806121988031007

